

Perbedaan antara INAPROC dan INAPROD



INAPROC
Indonesia National
Procurement



INAPROD
Indonesia National
Product Database

Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas secara edukatif dan informatif seluk-beluk INAPROC dan INAPROD, mulai dari latar belakang, pengertian, pelaku, sasaran, serta kaitannya dengan Sistem Informasi Desa. Pembahasan juga mencakup dampak implementasinya terhadap transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa.

Latar Belakang

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan produksi nasional. Dua sistem yang kini menjadi perhatian utama adalah **INAPROC (Indonesia National Procurement System)** dan **INAPROD (Indonesia National Product Database)**. Keduanya dikembangkan untuk mendukung kebijakan **Satu Data Indonesia**, yaitu integrasi data lintas instansi pemerintah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien, termasuk di tingkat **pemerintahan desa**.

Apa Itu INAPROC?

INAPROC (Indonesia National Public Procurement System) adalah **sistem informasi pengadaan barang dan jasa secara nasional** yang dikelola oleh **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**. Sistem ini menjadi *portal* utama untuk proses **pengadaan elektronik (e-procurement)** pemerintah, termasuk tender, katalog elektronik (e-catalogue), dan sistem informasi penyedia barang/jasa.

Tujuan utama INAPROC adalah:

- Meningkatkan **transparansi** dan **akuntabilitas** dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Mencegah praktik korupsi dan kolusi dalam proses tender.
- Mempercepat proses pengadaan agar efisien dan tepat sasaran.
- Menyediakan akses data terbuka bagi masyarakat terkait proyek dan belanja pemerintah.

Dengan INAPROC, setiap instansi pemerintah, mulai dari **kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga desa**, dapat melakukan proses pengadaan secara elektronik, terintegrasi, dan dapat diaudit publik.

Apa Itu INAPROD?

Sementara itu, **INAPROD** (Indonesia National Product Database) merupakan **basis data nasional produk dalam negeri** yang dikembangkan oleh **Kementerian Perindustrian** dan terhubung dengan LKPP. Fungsinya adalah untuk **mendata, mengklasifikasi, dan menampilkan seluruh produk dalam negeri** yang telah memiliki **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**, guna memperkuat kemandirian industri nasional.

Melalui INAPROD, pemerintah dapat memastikan bahwa barang atau jasa yang digunakan dalam proyek pengadaan lebih banyak memanfaatkan **produk buatan dalam negeri**, sejalan dengan semangat **Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI)**.

Tujuan INAPROD adalah:

- Meningkatkan daya saing produk nasional.

- Memudahkan pelaku usaha lokal mendaftarkan dan memasarkan produknya secara digital.
- Mendorong pengadaan pemerintah menggunakan produk dalam negeri.
- Menghubungkan data produksi nasional dengan sistem pengadaan (INAPROC).

Pelaku, Sasaran, dan Penerima Manfaat

Baik INAPROC maupun INAPROD melibatkan sejumlah pelaku dan penerima manfaat:

Kategori	INAPROC	INAPROD
Pengelola Sistem	LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)	Kementerian Perindustrian RI
Pelaku Utama	Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, desa, dan penyedia barang/jasa	Industri dalam negeri, UMKM, dan pelaku usaha lokal
Sasaran	Transparansi dan efisiensi pengadaan pemerintah	Penguatan industri dan produk nasional
Penerima Manfaat	Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha	Pelaku industri nasional, pemerintah, dan konsumen publik

Melalui integrasi INAPROC dan INAPROD:

- Data pengadaan pemerintah akan langsung terhubung dengan data produk nasional.
- Pemerintah pusat hingga desa dapat mengakses informasi yang sama untuk perencanaan dan belanja barang/jasa.
- Akuntabilitas pengeluaran keuangan negara meningkat karena data dapat dilacak lintas instansi.

Kaitan dengan Sistem Informasi Desa dan Pemerintahan Desa

Bagi **pemerintahan desa**, keberadaan INAPROC dan INAPROD membawa dampak signifikan dalam tata kelola pembangunan. Melalui integrasi dengan **Sistem Informasi Desa (SID)**, desa dapat:

- Melakukan pengadaan barang/jasa secara transparan, terdata, dan terdokumentasi.
- Memilih produk dalam negeri dari daftar INAPROD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa.
- Menyusun perencanaan dan pelaporan pembangunan berbasis data aktual.
- Mengoptimalkan penggunaan **Dana Desa (DD)** dan **Alokasi Dana Desa (ADD)** agar tepat sasaran dan sesuai aturan LKPP.

Dengan kata lain, desa tidak hanya menjadi pengguna dana, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi digital nasional.

Dampak Implementasi INAPROC dan INAPROD

1. **Transparansi dan Efisiensi;** Proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat dipantau publik secara daring.
2. **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);** Pemerintah desa didorong membeli produk lokal, memberdayakan UMKM sekitar.
3. **Akuntabilitas Anggaran Desa;** Setiap pengeluaran memiliki jejak digital, memperkecil risiko penyimpangan dana.
4. **Integrasi Data Pembangunan;** Desa memiliki akses pada data nasional, memudahkan evaluasi dan sinkronisasi kebijakan.
5. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal;** Pelaku UMKM desa mendapat peluang untuk mendaftarkan produk mereka di INAPROD dan ikut serta dalam pengadaan.

Penutup

Digitalisasi pemerintahan melalui INAPROC dan INAPROD bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan langkah strategis menuju **pemerintahan yang terbuka, efisien, dan berdaulat data**. Dengan integrasi menuju **Satu Data Indonesia**, sistem informasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara **pemerintah pusat, daerah, hingga desa**, menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.